



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA PENINGKATAN LITERASI DAN TENAGA PERPUSTAKAAN
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI. 2. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikburistek RI. 3. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI 4. Dirjen Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT RI 5. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDT RI 6. Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo RI 7. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB RI 8. Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK RI 9. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN
Hari/Tanggal	: 5 Juli 2023
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional 2. Perkembangan Penyusunan Peta Jalan Literasi Nasional 3. Kebijakan Anggaran Literasi dan Pengangkatan ASN Tenaga Perpustakaan (Pustakawan dan tenaga Teknis Perpustakaan)

- Hadir Komisi X DPR RI : 16 orang dari 31 orang Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI.
- Hadir Narasumber : 1. Anindito Aditomo, S.Psi.,M.Phil., Ph.D. (Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI)
2. Prof. Endang Aminudin Azis, MA., Ph.D. (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikburistek RI)
3. Sri Purwaningsih, SH., M.Ap (Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI)
4. Rafdinal, Sos, M.Tp (Plt. Dirjen Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT RI)
5. Bonifasius Wahyu Pudjianto (Direktur Pemberdayaan Informatika mewakili Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo RI)
6. Aba Subagja (Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur mewakili Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB RI)
7. Molly Prabawaty (Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK RI)
8. Dr.Akhmad Syauki, S.H.,M.H (Direktur Peraturan Perundang-Undangan mewakili Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.44 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikburistek RI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Plt.Dirjen Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kawasan Pedesaan Kemendes PDT, Direktur Pemberdayaan Informatika Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo RI, Deputi Bidang SDM Aparatur kementerian PAN-RB RI, Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK RI, Direktur Peraturan Perundang-Undangan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN) dan menampung

pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikburistek RI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kawasan Pedesaan, Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA), Deputi Bidang SDM Aparatur kementerian PAN-RB RI, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK RI, Deputi Bidang pembinaan Manajemen Kepegawaian (BKN) dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI yang menyampaikan beberapa poin utama antara lain: (bahan terlampir).

Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek RI

1. Penguatan literasi dilakukan melalui Asesmen Nasional, Kurikulum Merdeka, Perbukuan, penguatan kapasitas guru, kepek dan pemerintah daerah.
2. Kemampuan literasi murid menjadi salah satu komponen utama Indeks SPM bidang pendidikan yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah sesuai Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 dan Permendagri No. 59 Tahun 2021.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI

1. Program Gerakan Literasi Nasional bertujuan untuk membangun budaya literasi, menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, menguatkan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan, melestarikan kebudayaan dan jatidiri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan nasional Revolusi Mental,
2. Aktivitas Gerakan Literasi Nasional dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
3. Capaian Gerakan Literasi Nasional 2016-2019 antara lain penyediaan bahan literasi, bimbingan teknis fasilitator literasi, pembelajaran literasi dan festival literasi.

4. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek RI melalui kolaborasi Badan Bahasa, BSKAP, Ditjen PDM, dan Ditejen GTK meluncurkan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI

1. Beberapa isu strategis perpustakaan daerah antara lain: minimnya distribusi anggaran pengembangan perpustakaan, kurangnya akses layanan sarana prasarana perpustakaan, terbatasnya jumlah perpustakaan berstandar nasional, kurangnya inovasi layanan perpustakaan, kurangnya koleksi dan pemanfaatan perpustakaan, kurangnya tenaga pustakawan dan pemustaka.
2. Dukungan Kemendagri RI dalam penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemda antara lain melalui berbagai kebijakan yang mendukung literasi.

Dirjen Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT

1. Terdapat 62 Kabupaten Daerah Tertinggal (berdasarkan Perpres No. 63/2020). Adapun penyebab ketertinggalan adalah sarana dan prasarana (26,48%), perekonomian masyarakat (21,4%), aksesibilitas (20,25%), SDM (13,94%), kemampuan keuangan daerah (10,35%), karakteristik daerah (7,84%).
2. Rencana intervensi perpustakaan nasional pada RAN PPDT Tahun 2023 yakni (1) Penyaluran Bantuan Buku Siap Layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) sebanyak 5 kegiatan, (2) Pemberian Bantuan Pojok Baca Digital 1 kegiatan, (3) Pemberian Bantuan Peningkatan Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebanyak 13 kegiatan.

Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDT:

1. Permasalahan pendidikan di perdesaan: rendahnya kualitas pendidikan masyarakat desa, angka melek huruf di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan (BPS 2019), dan rata-rata lama sekolah masih rendah.
2. Literasi desa untuk peningkatan ekonomi perdesaan antara lain pendamping desa melakukan upaya untuk membangkitkan minat baca masyarakat desa, memperbanyak perpustakaan/taman bacaan masyarakat di perdesaan, penyediaan buku praktis, penyediaan buku motivasi dari pengusaha dan BUMDesa sukses, dan pengembangan perpustakaan digital desa.
3. Sinergi meningkatkan literasi desa terdiri dari penyediaan infrastruktur perpustakaan desa Kemendes PDTT melalui kebijakan Permendesa 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021, *delivery* bahan-bahan pustaka

hard copy dan *e-book* dari kabupaten/kota di desa melalui kegiatan pendampingan desa, kurikulum pembelajaran. Dukungan Kemendikbudristek RI dan Perpustakaan Nasional RI antara lain kurikulum pembelajaran formal dan nonformal sesuai kebutuhan desa, Pendidikan, bisnis UMKM, advokasi masyarakat; bahan-bahan pustaka pendukung, pembelajaran aring Bersama untuk warga desa.

Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo RI

1. Peta jalan transformasi digital memperjelas kedudukan pemerintah sebagai *enabler* teknologi digital dengan mendorong pemanfaatan teknologi di seluruh sektor. Peta jalan transformasi merupakan acuan yang digunakan Kementerian Kominfo RI untuk memajukan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia melalui transformasi digital.
2. Program literasi digital nasional dengan *tagline* Indonesia Makin Cakap Digital merupakan penguatan keterampilan digital dasar masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki berbagai kelas daring dan luring secara gratis untuk seluruh masyarakat di 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi Indonesia.
3. Kerangka program literasi digital disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB RI

1. Berdasarkan UU No 5 tahun 2014, terdapat prinsip Meritokrasi yaitu setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah memenuhi persyaratan. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
2. Rencana kebijakan pemenuhan ASN Tahun 2023-2024 meliputi tenaga guru di instansi pusat dan daerah serta tenaga dosen, meliputi tenaga kesehatan di instansi pusat dan daerah, tenaga teknis fungsional dan tenaga teknis pelaksana.
3. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 berfokus pada pelayanan dasar (guru dan tenaga Kesehatan) dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah Non ASN, memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital dan data *scientist* secara terukur, merekrut CPNS dengan sangat selektif dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK RI:

1. KSP Literasi oleh Kemenko PMK meliputi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait peningkatan pembudayaan literasi, dilaksanakan sejak tahun 2021, setelah pembudayaan literasi masuk dalam prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024, serta terbentuknya unit kerja Asdep literasi, inovasi, dan kreativitas.
2. KSP terhadap peningkatan budaya literasi dilaksanakan oleh pejabat Eselon II, dengan dukungan anggaran KSP yang digunakan untuk KSP pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, sastra dan aksara daerah.

Deputi Bidang pembinaan Manajemen Kepegawaian (BKN)

1. Berdasarkan peta kebutuhan pustakawan, terdapat Pembina untuk jabatan fungsional. Pengangkatan jabatan fungsional dalam bidang perpustakaan perlu diatur dengan regulasi yang tepat.
 2. Indikator kebutuhan jabatan fungsional disusun dari kebutuhan jabatan fungsional.
- B. Terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan narasumber, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI berpandangan diantaranya sebagai berikut:
1. Mendesak BSKAP dan BPP Bahasa Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Perpustakaan RI dan K/L lain pengampu program literasi untuk menyusun atau menyepakati satu indeks literasi Indonesia yang dapat mengukur semua aspek literasi dan kinerja pemerintah.
 2. Mendorong BSKAP menyampaikan peta capaian literasi di daerah berdasarkan data rapor pendidikan termasuk data perbandingan penggunaan kurikulum yang berbeda, sebagai bahan pengawasan Komisi X DPR RI terhadap implementasi program literasi kementerian.
 3. Jika sepakat bahwa tenaga perpustakaan merupakan bagian penting dalam peningkatan literasi masyarakat, maka Pemerintah perlu merumuskan pola rekrutmen tenaga perpustakaan atau pola penugasannya dengan tidak mengurangi kualitas SDM perpustakaan di perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah, diantaranya memperbaiki kelas jabatan fungsional tenaga perpustakaan.
- C. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI akan mengundang kembali Kemenkeu RI, Bappenas RI dan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT, Dirjen Bina Administrasi Keuangan

Daerah Kemendagri RI, Kemenaker RI, Kemenag RI pada masa sidang berikutnya.

- D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.
- E. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI mengharapkan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI. Jawaban tertulis paling lambat disampaikan tanggal 12 Juli 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.25 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM